



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

ARDI

ARSIP DIGITAL INTEGRASI "SEKALI
SIMPAN, SELAMANYA AMAN"

PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Inspektorat Daerah memiliki fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan serta penggunaan anggaran di lingkungan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut menghasilkan beragam dokumen laporan pemeriksaan, kertas kerja, temuan audit, surat-menyurat, rekaman hasil monitoring, dan laporan hasil revidi terkait keuangan maupun kinerja. Sentralisasi arsip digital bertujuan menata semua keluaran ini menjadi koleksi terstruktur yang mudah dicari, dapat dipertanggungjawabkan, dan tersedia untuk pemangku kepentingan sesuai ketentuan. Pengelolaan arsip pemerintahan umumnya harus sejalan dengan peraturan kearsipan nasional, perlindungan data pribadi, aturan penyimpanan dokumen resmi, serta standar tata naskah dinas dan retensi arsip.

Di tingkat praktis, Inspektorat perlu memastikan arsip digital memiliki kekuatan hukum (otentikasi, integritas), memenuhi persyaratan retensi, dan melindungi informasi rahasia/privat. Selain itu, diperlukan kebijakan internal (SOP pengelolaan, klasifikasi dokumen, prosedur destruksi) yang selaras dengan ketentuan nasional dan pedoman tata kelola TI. Diharapkan arsip digital mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pemeriksaan, mempercepat akses dan distribusi dokumen antarunit kerja, mengurangi risiko kehilangan/kerusakan arsip fisik, serta mengoptimalkan ruang dan biaya penyimpanan. Harapan lainnya meliputi kemampuan audit trail (jejak perubahan), pencarian berbasis metadata/isi penuh, interoperabilitas dengan sistem pemerintahan lain, serta dukungan untuk analitik berbasis dokumen yang membantu perumusan rekomendasi pengawasan. Untuk sentralisasi arsip digital, diperlukan pemetaan jenis data (dokumen administratif, teknis, finansial, hasil audit), format file (PDF/A, CSV, foto, rekaman audio/video), serta metadata standar (tanggal, pembuat, unit kerja, kategori, status retensi). Selain itu, analisis risiko dan klasifikasi kerahasiaan harus dilakukan agar data sensitif mendapat proteksi sesuai tingkatannya.

Pada praktiknya, banyak inspektorat daerah berada pada kondisi hybrid; sebagian dokumen masih berbentuk kertas, sementara sebagian lain sudah dipindai tanpa metadata yang memadai. Hambatan umum meliputi keterbatasan infrastruktur TI (server, jaringan, backup), kurangnya fungsi manajemen metadata dan SOP yang konsisten, kemampuan SDM pengarsipan dan keamanan siber yang masih perlu peningkatan, serta belum adanya integrasi penuh antarsistem instansi. Sering juga terdapat ketidakjelasan status hukum dokumen digital yang dipindai (otentikasi), serta risiko kebocoran data karena praktik penyimpanan yang belum terenkripsi atau pengendalian akses yang longgar. Dalam kegiatan revidi pada tahun 2025, Irban Ekonomi dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka telah melaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kegiatan revidi. Sejak bulan Mei, kegiatan pembuatan arsip digital KKR dan LHR di Irban Ekonomi dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bangka masih berlangsung secara intensif meskipun penulis masih terlibat dalam tugas sebagai anggota tim pembantu pada kegiatan revidi di Irban.

Selama SPMT menjadi CPNS hingga saat ini, penulis sudah terlibat dalam sebanyak lima kegiatan revidi. Kondisi ini menuntut adanya manajemen waktu yang baik serta koordinasi kerja yang efektif agar seluruh proses digitalisasi arsip tetap berjalan sesuai target. Selama ini, arsip Kertas Kerja Revidi (KKR) dan Laporan Hasil Revidi (LHR) di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka masih tersebar dan disimpan pada masing-masing auditor dan di bagian sekretariat. Cara tersebut rentan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan ruang penyimpanan, risiko kerusakan dokumen, serta kesulitan dalam proses pencarian kembali arsip. Kondisi ini dapat menghambat kinerja Inspektorat dalam memberikan informasi yang cepat dan akurat, terutama saat diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, audit, maupun koordinasi dengan instansi lain.

Penerapan arsip digital hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Arsip digital memungkinkan penyimpanan dokumen dalam bentuk elektronik yang lebih ringkas, mudah dicari, serta dapat diakses kapan saja. Dengan adanya sistem ini, Inspektorat Daerah mampu mempercepat alur kerja, meningkatkan transparansi, serta meminimalisasi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen akibat faktor eksternal. Selain itu, digitalisasi arsip sejalan dengan agenda transformasi

digital pemerintah, yang mendorong efisiensi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Implementasi arsip digital di Inspektorat Daerah dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui akuntabilitas, efektivitas, dan pelayanan publik yang lebih prima. Penerapan arsip digital juga memberikan nilai tambah dalam aspek keamanan data.

Dengan adanya sistem pengendalian akses dan backup digital, kerahasiaan serta integritas dokumen dapat lebih terjamin. Hal ini sangat penting mengingat arsip di Inspektorat sering kali berisi informasi sensitif yang berkaitan dengan hasil audit, pengawasan, maupun rekomendasi tindak lanjut kepada perangkat daerah. Dari latar kondisi dan harapan tersebut, prioritas implementasi adalah penyusunan pengarsipan digital khusus Inspektorat Irban Ekonomi dan Keuangan dengan fokus pada dokumen-dokumen yang paling sering dipakai seperti Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). Implementasi bertahap disertai pengukuran manfaat akan membuat sistem sentralisasi arsip digital Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) bisa mendukung fungsi pengawasan Inspektorat Daerah yang efektif. Berdasarkan masalah tersebut di atas, penulis akan merancang kegiatan aktualisasi dengan judul “A R D I (Arsip Digital Integrasi) Sekali Simpan, Selamanya Aman”.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi diawali oleh permasalahan pengelolaan arsip Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka yang masih tersebar pada masing-masing auditor dan bagian sekretariat, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pencarian kembali dokumen, keterbatasan ruang penyimpanan, serta risiko kerusakan maupun kehilangan arsip. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan arsip secara lebih tertata dan efisien. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa pengembangan ARDI (Arsip Digital Integrasi) sebagai sistem sentralisasi arsip digital KKR dan LHR. Inovasi ini dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses dokumen, memperkuat keamanan dan integritas arsip, serta mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

D. Tujuan

Tujuan yang dapat dicapai dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini adalah:

1. Untuk menyelesaikan isu yang diangkat oleh penulis yaitu untuk menerapkan sentralisasi arsip digital Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) di Irban Ekonomi dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bangka
2. Membuat perangkat lunak berupa media penyimpanan dokumen berbasis digital Google Drive bernama A R D I (Arsip Digital Integrasi) untuk penyimpanan dan akses Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) serta mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN BERAKHLAK. (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal adaptif, kolaboratif) dan
3. Mengetahui peran dan kedudukan PNS NKRI.

E. Manfaat

- a. Meningkatkan kepekaan dan kontribusi ASN dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerja.

- b. Mengimplementasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK dan bela negara dalam pelaksanaan tugas.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan yang lebih efektif.
- d. Meningkatkan efisiensi kerja serta mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi.
- e. Mendukung keamanan data, kemudahan akses arsip, serta transformasi digital pemerintahan.

F. Hasil

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem sentralisasi arsip digital Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) melalui media penyimpanan berbasis digital ARDI (Arsip Digital Integrasi) yang memudahkan proses penyimpanan dan pengelolaan dokumen pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bangka.
2. Meningkatnya kemudahan akses, pencarian, dan pengelolaan arsip digital bagi auditor dan unit kerja terkait, sehingga mendukung efisiensi kerja serta mempercepat penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan.
3. Meningkatnya keamanan dan integritas dokumen pengawasan, melalui sistem penyimpanan digital yang lebih terstruktur sehingga dapat meminimalisasi risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan arsip.
4. Mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan nilai ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas pengawasan, sekaligus menjadi bagian dari upaya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Identifikasi Permasalahan	Berkonsultasi dengan Mentor, Ketua Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka	8 – 11 September 2025
Perancangan Awal	Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait	12 September - 6 Oktober 2025
Pengembangan	Membuat Media Digitalisasi Arsip Dokumen KKR dan LHR di Irban Ekonomi dan Keuangan	7 – 20 Oktober 2025
Implementasi	Sosialisasi Penggunaan Google Drive ARDI (Arsip Digital Integrasi)	22 Oktober – 3 November 2025
Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap penerapan digitalisasi peangrsipan dokumen KKR dan LHR dan menyampaikan laporan hasil kegiatan	4 – 12 November 2025

H. Pedoman Teknis

Sebelum dokumen diunggah ke dalam sistem ARDI, pengelola dan tim auditor harus memastikan kualitas dan kelengkapan data.

- a. Identifikasi Jenis Dokumen: Fokus utama adalah dokumen Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
- b. Pemeriksaan Fisik/Digital Awal: Memastikan dokumen hasil pemindaian (scan) jelas, tidak terpotong, dan dapat dibaca dengan mudah.
- c. Validasi Kelengkapan: * Pengelola melakukan checklist data. Jika data belum lengkap/valid, dokumen dikembalikan ke Tim Auditor untuk dilengkapi (estimasi waktu: 2 hari). Jika sudah lengkap, dokumen diteruskan untuk penyusunan struktur folder.